

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE* DI INDONESIA**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2013-2015)**

Rahmadhani

Thatarahmadhani@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study aimed to verify the influence of corporate governance structure to mandatory disclosure on Manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2013-2015. The variables tested in this study consisted of managerial ownership, institutional ownership, the proportion of independent directors, the number of commissioners meeting, the number of commissioners and the number of audit committee members. This study using purposive sampling method in determining the number of samples used, obtained 120 Indonesian manufacturing companies. Tests performed include: descriptive statistics, classical assumptions, regression, coefficient of determination, F test and t test.

Results of the study: 1) managerial ownership did not affect the level of compliance of mandatory disclosure in Indonesia, 2) institutional ownership did not affect the level of compliance of mandatory disclosure in Indonesia, 3) the proportion of independent directors positively affects the level of compliance of mandatory disclosure in Indonesia, 4) the number of commissioners meeting negatively affect the level of mandatory disclosure in Indonesia, 5) the number of commissioners did not affect the level of compliance of mandatory disclosure in Indonesia, 6) the number of audit committee members did not affect the level of compliance of mandatory disclosure in Indonesia.

Keywords: *Managerial ownership, institutional ownership, the proportion of independent directors, the number of commissioners meeting, the number of commissioners, the number of audit committee members, mandatory disclosure.*

I. PENDAHULUAN

Mandatory disclosure di Indonesia telah diatur oleh Bapepam-LK melalui keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: Kep-431/Bl/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Dalam aturan SAK konvergensi IFRS juga sudah dijelaskan secara terperinci mengenai item-item pengungkapan wajib. Berdasarkan peraturan yang ada, maka semestinya tingkat *mandatory disclosure* di Indonesia dapat memperoleh hasil yang ideal yaitu 100%. Tetapi pada kenyataannya bahwa peraturan yang ada tidak menjamin terealisasinya praktik *mandatory* yang lebih tinggi.

Pernyataan tersebut terbukti dengan hasil penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007) menemukan bahwa rerata tingkat kepatuhan masih rendah, yaitu sebesar 37,000%. Prawinandi, dkk (2012) menemukan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan yaitu tingkat kepatuhan terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS sebesar 69,900%. Utami, dkk (2012) mendapatkan hasil penelitian yang lebih besar mengenai *mandatory disclosure* di Indonesia baru mencapai 72,203%. Supriyono, dkk (2014) membuktikan bahwa tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS untuk industri perbankan di Indonesia memiliki rerata 75,92%.

Fenomena yang terkait dengan *mandatory disclosure* terjadi pada kasus tahun 2009 menimpa perusahaan BUMN yaitu PT. Waskita Karya yang melakukan kelebihan pencatatan laba bersih pada laporan keuangan 2004-2008 sekitar Rp 400 miliar. Laba yang seharusnya masuk pembukuan tahun depan dicatat sebagai laba tahun lalu. Kasus lainnya yaitu pada PT. Bakrieland Development Tbk (ELTY) tahun 2013 yang tidak mengungkapkan kewajiban jangka panjang yang sebenarnya. Perusahaan memiliki hutang obligasi sebesar US\$ 155 juta dan tidak dapat

membayarnya saat jatuh tempo. Akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak agar perusahaan segera memberikan laporan terbuka kepada publik, karena sebagai perusahaan terbuka seharusnya mengungkapkan semua informasi yang terkait dengan perusahaan.

Dari fenomena diatas dapat dikatakan bahwa PT. Waskita Karya dan PT. Bakrieland Development menimbulkan ketidakpercayaan dari pengguna laporan keuangan dan mempertanyakan integritas laporan keuangan yang disajikan. PT.Waskita Karya tidak menyajikan laba perusahaan yang sebenarnya dan PT.Bakrieland Development tidak secara terbuka mengungkapkan kejadian yang ada di dalam perusahaan. Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan keadaan suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi (Hardiningsih, 2010).

Adina dan Ion (2008) menjelaskan bahwa tujuan daripada *mandatory disclosure* yaitu untuk membantu mengakomodasi dalam melengkapi sarana informasi bagi pengguna laporan keuangan, menentukan penanganan bobot kinerja dengan taat kepada aturan hukum dan SAK yang berlaku. Pengungkapan yang tinggi dalam suatu organisasi atau perusahaan akan meminimalisir ketidakpastian yang dihadapi investor. Daske dan Gedhardt (2006) menemukan bahwa penerapan IFRS di berbagai negara dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pengungkapan informasi keuangan perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Supriyono, dkk (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Supriyono, dkk (2013) adalah pada proksi *corporate governance* yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, jumlah rapat

dewan komisaris, jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit. Selain itu, perbedaannya terdapat pada jenis perusahaan dan tahun penelitian. Penelitian Supriyono, dkk (2014) pada perusahaan perbankan tahun 2009-2012, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur tahun 2013-2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari peran *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independent, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI. Penelitian kali ini dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan beberapa alasan sebagai berikut: (i) perusahaan manufaktur memiliki kecenderungan untuk menyampaikan lebih banyak pengungkapan kepada pemakai laporan keuangan, dan (ii) perusahaan manufaktur memiliki basis investasi yang luas karena dalam proses operasinya mengandalkan modal dari investor untuk mendapatkan aset tetap (Utami, dkk 2013).

II. KERANGKA TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

A. Teori Agensi

Jensen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori agensi berkaitan dengan kerja sama antar dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Teori keagenan merupakan korelasi kerja sama antar pihak pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*), dimana *principal* memberikan otoritas pada agen dalam mengatur perusahaan dan mengambil keputusan. Apabila prinsipal dan agen mengoptimalkan keahlian, maka agen dapat dipercaya tidak akan selalu melakukan yang terbaik untuk kepentingan prinsipal.

B. *Mandatory Disclosure*

Mandatory disclosure didefinisikan sebagai pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pada peraturan atau standar yang telah ditetapkan oleh Bapepam-LK. Informasi yang akan diberikan berguna bagi *stakeholders* sebagai acuan kesehatan dari laporan keuangan perusahaan dan sekaligus membantu dalam memahami isi dan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan.

Berdasarkan standar akuntansi berbasis IFRS, terdapat dua pengungkapan laporan keuangan, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* yang dilakukan yaitu berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. *Mandatory disclosure* yang dilaporkan perusahaan pada pihak publik menjadi acuan bagi investor dalam memutuskan untuk melakukan transaksi investasi pada perusahaan tersebut. Tanpa peraturan mengenai *mandatory disclosure* dalam laporan keuangan dapat memberikan kemungkinan pada pihak perusahaan dalam menyembunyikan informasi penting yang pada dasarnya dapat diungkapkan, oleh sebab itu diperlukan aturan mencakup hal tersebut untuk melindungi kepentingan investor. *Mandatory disclosure* memiliki tujuan untuk melengkapi keperluan informasi bagi pengguna laporan keuangan dan penanganan atas kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan SAK yang berlaku (Prawinandi dkk., 2012).

C. *Corporate Governance*

Menurut FCGI (2001) *corporate governance* merupakan kebijakan yang secara keseluruhan mengatur korelasi antar pemegang saham, pemerintahan,

pengurus perusahaan, pihak kreditur, karyawan bahkan pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya. Dalam mencapai *corporate governance* diperlukan beberapa komponen-komponen yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* dengan benar seperti adanya struktur dan mekanisme *corporate governance*.

Di Indonesia struktur *corporate governance* terdiri dari pemegang saham, komisaris, direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, manajer dan karyawan, auditor eksternal, auditor internal, dan *stakeholder* lainnya. Dari beberapa item *corporate governance* tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur *corporate governance* adalah bagian dari organ yang terdapat dalam suatu perusahaan yang melakukan fungsi tata kelola sebagai pihak yang menjaga dan sekaligus yang menjalankan perusahaan. Struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independent, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit.

Efektivitas *corporate governance* ditentukan oleh bagaimana mekanisme *corporate governance* tersebut bekerja dalam perusahaan (Ashurov, 2010). Sebaik apapun suatu struktur *corporate governance* tetapi jika mekanisme tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* tidak akan pernah tercapai (Herwidayatmo, 2000 dalam Utami dkk., 2012).

D. Kepemilikan Manajerial dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan yang memiliki peran pengambilan keputusan dalam perusahaan yang

diukur berdasarkan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen yang ada. Pemberian kesempatan kepada manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Dengan adanya keterlibatan manajer dapat membantu untuk mendorong manajer dalam bertindak secara hati-hati karena manajer akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambil sebagai bagian dari pemegang saham. Semakin banyak kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan maka akan memaksimalkan pengungkapan. Karena manajemen akan lebih giat dalam meningkatkan kinerja yang nantinya akan memberikan dampak lebih kepada perusahaan, terutama bagi para pemegang saham yaitu dirinya sendiri.

Penelitian Utami, dkk (2012) dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan periode tahun 2009-2010. Tahun tersebut dipilih karena merupakan tahun dimana pengimplemetasian IFRS di Indonesia secara bertahap mulai efektif. Hasil penelitian Utami, dkk (2012) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS.

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

E. Kepemilikan Institusional dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Kepemilikan institusional dapat membantu dalam memonitor kinerja yang dilakukan manajemen. Kepemilikan institusional yang relatif besar akan menghasilkan upaya-upaya *monitoring* yang lebih intensif. *Monitoring* yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung terhadap besarnya investasi yang dilakukan. Kepemilikan institusional yang besar dalam suatu perusahaan akan memberikan pengaruh yang besar dalam dorongan pengawasan

pada kinerja manajemen oleh pihak independen tersebut sehingga kinerja yang ada pada perusahaan akan meningkat secara signifikan.

Alvionita dan Taqwa (2015) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2013. Hasil penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) menyatakan kepemilikan institusional pengaruh positif terhadap *mandatory disclosure*. Karena, apabila kepemilikan institusional yang besar akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS.

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

F. Proporsi Komisaris Independen dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Dewan komisaris independen adalah dewan yang bertugas dalam melakukan pengawasan secara independen baik umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam menjalankan kegiatan manajemen. Komisaris independen merupakan komponen yang penting sebagai pihak yang dapat memecahkan masalah keagenan yang terjadi pada *principal* atau pemegang saham dengan *agen* atau manajer.

Dewan komisaris yang berperan sebagai penjaga akan berkerja dan bertindak berdasarkan dengan aturan yang ada termasuk ketentuan tentang *mandatory disclosure* perusahaan. Oleh sebab itu, pengawasan intensif yang dilaksanakan pihak komisaris independen akan meningkatkan kecakapan pengungkapan informasi dalam perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Prawinandi, dkk (2012) pada seluruh perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2010 dan

Widjayanti dan Wahidawati (2015) yang menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh positif pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS.

H3: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

G. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Menurut *Corporate Governance Guidelines* (2007) dalam Utami dkk (2012), jadwal pertemuan tetap yang dimiliki dewan komisaris dapat dilakukan berdasarkan pertemuan yang ada maupun pertemuan tambahan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Peran dewan komisaris berfungsi memonitoring keputusan manajemen. Dewan komisaris tugas yang wajib dalam melakukan *monitoring* atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya. Semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris akan memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Suhardjanto dan Kharis (2012) yaitu pada BUMN non-keuangan yang terdaftar di BEI, selama periode tahun 2005-2010, yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara jumlah rapat dewan komisaris dan kepatuhan pengungkapan.

H4: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

H. Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Anggota dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, yang terdiri dari

komisaris utama, komisaris independen dan komisaris. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris, termasuk komisaris utama adalah setara. Dewan komisaris dinilai memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan laporan tahunan karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi pada perusahaan.

Dewan komisaris memiliki wewenang dalam mengawasi secara keseluruhan mengenai kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan. Minimal dewan komisaris dalam suatu perusahaan yaitu dua orang. Pemberhentian maupun pengangkatan dewan komisaris dilaksanakan melalui rapat umum pemegang saham. Semakin besar jumlah dewan komisaris pada perusahaan maka semakin besar tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* karena komisaris yang kompeten akan mempunyai integritas dan mempunyai pengalaman yang banyak serta ketelitian dalam melakukan tugasnya. Selain itu komisaris akan mempertanggungjawabkan kepengurusannya dengan baik dalam kegiatan RUPS sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Dewan komisaris merupakan bagian dari susunan pengendalian internal yang mana memiliki tanggungjawab untuk mengawasi tindakan manajemen puncak dalam memperluas pengungkapan. Pada penelitian yang dilakukan Hafiz, dkk (2015) yaitu populasinya seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2013. Hasil penelitiannya, menjelaskan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berkorelasi positif pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

H5: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

I. Jumlah Anggota Komite Audit dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Komite audit merupakan komite yang nantinya bekerja pada perusahaan untuk membantu dalam melakukan monitoring kinerja pada manajemen perusahaan agar nantinya dapat menghindari tingkat kecurangan dalam menerbitkan laporan keuangan yang merugikan para pengguna laporan keuangan. Pada pelaksanaan *corporate governance*, teori agensi mewajibkan untuk melaksanakan pengungkapan laporan keuangan untuk mencegah terjadi perselisihan antara pihak yang memiliki kepentingan. Pada kenyataannya bahwa komite audit dituntut untuk bekerja dalam mengawasi kinerja manajemen dalam melakukan pengungkapan secara akurat, lengkap, jelas dan teliti. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota komite audit maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Pitasari dan Septiani (2015) melakukan penelitian pada seluruh perusahaan jasa pada periode 2010-2012, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berkorelasi positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Artinya, jumlah anggota komite audit yang banyak maka pengawasan yang dilakukan komite audit akan semakin ketat yang akhirnya akan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gunawan dan Hendrawati (2016) dan penelitian yang dilakukan Prawinandi, dkk (2012).

H6: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

III. METODE PENELITIAN

A. Populasi, Data, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan tahunan selama periode 2013 sampai 2015. Berdasarkan kriteria teknik pengambilan sampel tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 perusahaan untuk masing-masing tahun. Sehingga jumlah observasi dalam penelitian adalah 120 data observasi.

Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari annual report perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Tahun tersebut dipilih karena merupakan tahun terbaru serta tahun dimana konvergensi IFRS telah dilakukan secara penuh di Indonesia. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan adalah perusahaan yang mengeluarkan laporan tahunan selama tahun penelitian dan mengungkapkan informasi lengkap yang dapat digunakan untuk memenuhi variabel independen.

B. Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *mandatory disclosure*. Identifikasi item pengungkapan dilakukan dengan menggunakan *checklist disclosure* yaitu dari Bapepam-LK. *Mandatory disclosure* diukur dengan menggunakan teknik *scoring*, yakni jika item *mandatory disclosure* diungkapkan perusahaan di beri angka 1 dan bila tidak diungkapkan beri angka 0.

$$\text{MANDSCORE} = \frac{\text{Total klasifikasi item yang diungkapkan}}{\text{Jumlah item yaitu 73}} \times 100\%$$

Variabel Independen

1. Kepemilikan Manajerial

Indikator yang digunakan dalam mengukur kepemilikan manajerial adalah presentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar (Huafang dan Jianguo, 2007).

$$\mathbf{KM} = \frac{\mathbf{Jumlah\ saham\ yang\ dimiliki\ manajemen}}{\mathbf{Total\ saham\ beredar}} \times \mathbf{100\%}$$

2. Kepemilikan Institusional

Variabel kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi, lembaga atau kelompok dari seluruh jumlah saham perusahaan.

$$\mathbf{KI} = \frac{\mathbf{Jumlah\ saham\ yang\ dimiliki\ institusional}}{\mathbf{Total\ saham\ beredar}} \times \mathbf{100\%}$$

3. Proporsi Komisaris Independen

Indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu jumlah proporsi komisaris independen dibagi dengan total seluruh komisaris yang dimiliki dalam suatu perusahaan.

$$\mathbf{PRKI} = \frac{\mathbf{Jumlah\ dewan\ komisaris\ independent}}{\mathbf{Total\ dewan\ kom\ yg\ dimiliki\ perusahaan}} \times \mathbf{100\%}$$

4. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota dewan komisaris dalam mengawasi proses *corporate governance* untuk memastikan bahwa manajemen membudayakan *corporate governance*. Jumlah rapat dewan komisaris diukur dengan melihat total rapat dewan komisaris yang diselenggarakan selama satu periode.

5. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Dewan komisaris yaitu bagian penting dari *corporate governance* karena memiliki wewenang utama dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi pada pembuat kebijakan dan pengimplementasian kebijakan oleh dewan direksi serta memberi nasehat kepada dewan direksi. Jumlah dewan komisaris yang dimaksud di sini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris baik yang berasal dari internal maupun eksternal suatu perusahaan.

6. Jumlah Anggota Komite Audit

Dewan komite audit memiliki fungsi untuk mendampingi dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan kinerja perusahaan dan pelaksanaan tanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan, fungsi pengendalian internal, sistem manajemen resiko, serta fungsi audit internal dan eksternal, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada *shareholders* karena telah menjamin adanya mekanisme pengawasan dan pengelolaan. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi berganda untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$\text{MANDSCR} = \beta_0 + \beta_1\text{KM} + \beta_2\text{KI} + \beta_3\text{PRKI} + \beta_4\text{JRDK} + \beta_5\text{JADK} + \beta_6\text{JAKA} + e$$

Keterangan

MANDSCR : *Madatory Disclosure*
B : Konstanta

$\beta_1-\beta_6$: Koefisien Regresi
KM	: Kepemilikan Manajerial
KI	: Kepemilikan Institusional
PRKI	: Proporsi Komisaris Independen
JRDK	: Jumlah Rapat Dewan Komisaris
JADK	: Jumlah Anggota Dewan Komisaris
JAKA	: Jumlah Anggota Komite Audit
e	: <i>Error Terms</i>

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tabel 1
Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	64,049	2,991		21,416	,000
KM	,000	,029	,001	,011	,991
KI	-,013	,019	-,088	-,717	,475
PRKI	,114	,056	,256	2,046	,044
JRDK	-,149	,067	-,252	-2,217	,029
JADK	-,138	,304	-,054	-,453	,652
JAKA	,521	,819	,073	,636	,527

Berdasarkan pengujian pada Tabel 1 dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut:

$$\text{MANDSCR} = 64,049 + 0,000(\text{KM}) - 0,013(\text{KI}) + 0,114(\text{PRKI}) - 0,149(\text{JRDK}) - 0,138(\text{JADK}) + 0,521(\text{JAKA}) + e$$

A. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan kepemilikan manajerial memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,000, dengan signifikansi sebesar $0,991 > \alpha (0,05)$ sehingga kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure*. Dengan demikian hipotesis pertama **ditolak**.

Hal ini diduga karena berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat bahwa total kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan di Indonesia relatif kecil sehingga belum terdapat keserasian kepentingan antar pemilik dan manajer. Manajer yang memiliki kebebasan yang baik dalam mengakses informasi pihak internal dibandingkan dengan pihak eksternal. Apabila kepemilikan saham perusahaan dominan pada manajerial maka perusahaan tidak akan menyediakan informasi bagi publik karena pihak yang dominan bukan publik tetapi pihak internal perusahaan. Konsentrasi kepemilikan pada pihak manajemen tidak dapat menjamin manajemen untuk melakukan pengungkapan karena tuntutan informasi relatif rendah dibandingkan konsentrasi kepemilikan pihak eksternal (Akhtaruddin, 2008 dalam Alvionita, dkk 2015). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa adanya kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan tidak dapat menjamin untuk meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Fajriansyah (2013) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Akan tetapi tidak mendukung penelitian Utami, dkk (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

B. Pengaruh kepemilikan Institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi arahnya negatif sebesar -0,013 dengan signifikansi sebesar $0,475 > \alpha (0,05)$ sehingga kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* yang berarti hasil penelitian hipotesis kedua **ditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulan (2013) yang juga menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal ini disebabkan karena pihak institusi sebagai pemilik tidak begitu memperhatikan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* yang dilakukan perusahaan tetapi lebih memperhatikan informasi-informasi yang penting untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Selain itu, pihak institusi sebagai pemilik merasa tidak bertanggung jawab terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib karena hanya menggunakan hasil akhir dari laporan keuangan dan bukan sebagai pembuat laporan keuangan.

C. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Hasil uji hipotesis menunjukkan proporsi komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,114, dengan signifikansi sebesar $0,044 < \alpha (0,05)$ sehingga proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure*. Oleh sebab itu, hipotesis ketiga **diterima**.

Berdasarkan besarnya proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan maka proses penjagaan serta pengawasan yang dilakukan makin berkualitas dengan banyaknya jumlah pihak independen dalam perusahaan yang mendesak adanya keterbukaan dan kejelasan dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007). Adanya komisaris independen mempunyai tugas serta tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dalam hal transparansi kepada publik sehingga perusahaan cenderung mematuhi peraturan yang sudah ada.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Prawinandi, dkk (2012) dan Widjayanti dan Wahidawati (2015) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berkorelasi positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

D. Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berkorelasi negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Variabel jumlah rapat dewan komisaris (JRDK) nilai koefisien regresi arahnya negatif sebesar -0,149 dan nilai signifikansi 0,029 yang lebih kecil dari 0,050. Dengan demikian disimpulkan bahwa variabel jumlah rapat dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Oleh sebab itu, hipotesis keempat **ditolak**.

Kesadaran perusahaan untuk melakukan pengungkapan wajib bukan berdasarkan tinggi rendahnya intensitas rapat dewan komisaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya intensitas rapat dewan komisaris bukan pertimbangan untuk tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Kemungkinan hasil rapat belum secara maksimal dipakai untuk kepentingan perusahaan. Selain itu, seringkali terdapat seorang atau lebih dewan komisaris yang mendominasi kepentingan rapat dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan, padahal proses rapat sangat penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris (Muntoro, 2006 dalam Utami, dkk 2012).

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk (2012), Supriyono, dkk (2012), Pitasari dan Septiani (2015) dan Widjayantidan

wahidawati (2015) yang mengatakan jumlah rapat dewan komisaris tidak berkorelasi terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

E. Pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Variabel jumlah anggota dewan komisaris mempunyai nilai sig $0,652 > \alpha$ (0,05) dan arah koefisien regresi negatif -0,138, artinya jumlah anggota dewan komisaris tidak berkorelasi positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Dengan demikian hipotesis kelima **ditolak**.

Jumlah anggota dewan komisaris tidak berkorelasi signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* karena total anggota dewan komisaris yang banyak dapat mengakibatkan proses mendapatkan kesepakatan serta pengambilan keputusan menjadi sulit, panjang dan bertele-tele, sedangkan total anggota yang minim menyebabkan dewan komisaris tidak dapat memberikan tekanan kepada dewan direksi (Muntoro, 2005 dalam Prawinandi, dkk 2012) oleh sebab itu tidak dapat memotivasi perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi wajib yang lebih maksimal.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi, dkk (2012) dan Pitasari dan Septiani (2015). Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa, semakin besarnya jumlah anggota dewan komisaris akan mengakibatkan proses mendapatkan kesepakatan dan pengambilan keputusan menjadi rumit. Sehingga tidak dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure*.

F. Pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Variabel jumlah anggota komite audit (JAKA) dengan arah koefisien regresi positif sebesar 0,521 dengan nilai signifikansi 0,527 yang lebih besar dari 0,050. Dengan demikian disimpulkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Oleh sebab itu, hipotesis keenam **ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis enam menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Mandatory disclosure*. Penolakan hipotesis ini diduga karena total anggota komite audit yang terlalu banyak pada suatu perusahaan maka tingkat komunikasi serta koordinasi dalam komite audit menjadi sulit dilakukan sehingga tugas yang seharusnya dilaksanakan menjadi tidak efektif, terutama dalam pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk membantu dewan komisaris sehingga tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan *mandatory disclosure* yang lebih tinggi.

Adanya komite audit seharusnya mampu memberikan dorongan bagi pihak manajemen dalam mengungkapkan informasi lebih banyak kepada publik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvionita dan Taqwa (2015), Hafiz, dkk (2015) dan Widjayanti dan wahidawati (2015) yang mengatakan jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

V. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ; Kepemilikan manajeria tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia. Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia. Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS di Indonesia. Jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia. Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil yang lebih baik diantaranya sebagai berikut ; Penelitian yang akan datang bisa menambahkan tahun penelitian, sehingga dapat membandingkan perbedaan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* secara langsung setiap tahunnya. Memperluas objek penelitian, tidak hanya perusahaan manufaktur tetapi seluruh perusahaan non-*financial*. Penelitian yang akan datang dapat menambahkan variabel independen. Misalnya untuk variabel independen yaitu latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita. Dan yang terakhir, dapat menambahkan variabel pengungkapan sukarela pada perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut ; Jangka waktu periode pengamatannya tiga tahun dari tahun 2013-2015 sehingga

sampel yang digunakan sangat terbatas. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian dari perusahaan manufaktur saja sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk semua perusahaan. *Good corporate governance* yang digunakan masih menggunakan enam proksi yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adina, P., dan P. Ion. 2008. Aspect Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure. *Annals Faculty of Economics Journal* 3 (1): 1407-1411.
- Alvionita, I., dan S. Taqwa. 2015. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. 1-12.
- Ashurov, Z. 2010. The Corporate Governance Mechanism: How It works in the Context of Uzbekistan. The 2nd International Scientific and Practical Conference on Innovation Processes and Corporate Governance, Minsk, Belarus. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1748444. 15 November 2013.
- Daske, Holger dan Gedbhaedt. 2006. Internasional Financial Reporting Standart and Experts Perceptions Of Disclosure Quality. www.ssrn.com, 42: 461-498.
- Fajriansyah, F. 2013. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib IFRS. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2001. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance*. <http://www.fcgi.or.id/corporate-governance/articles.html>. 15 November 2013.
- Gunawan, B., dan Hendrawati, E.R. 2016. Peran Struktur *Corporate Governance* Dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1 (2016): 71-83.
- Hafiz, Rizky., Adriani, A., Chairina. 2015. Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib *Konvergensi IFRS* Pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Konferensi Regional Akuntansi II*. 1-25.
- Hardiningsih, Pancawati. 2010. Pengaruh Independensi, *Corporate Governance*, dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Kajian Akuntansi*, 2 (1):61-76. ISSN: 1979-4886.

- Jensen, Michael C. dan Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol 3: Hal. 305-360.
- Nasution, M., dan D. Setiawan. 2007. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*: 1-26.
- Nazaruddin, I., dan Basuki, T.A. 2016. Analisis Statistik dengan SPSS. Edisi Pertama. Yogyakarta:2015.
- Prawinandi, W., D. Suhardjanto dan H. Triatmoko. 2012. Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. 1-27.
- Pitasari, A., dan A. Septiani. 2015. Analisis Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS Pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Diponegoro Journal Of Accounting*. 1-9.
- Sudarmadji, A.M. dan L. Sularto. 2007. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding PESAT 2*.
- Suhardjanto, D., dan Kharis, A. 2012. Corporate Governance dan Ketaatan Pengungkapan Wajib pada Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.16, No.1. 37-44.
- Supriyono, E., A. Mustaqim dan D. Suhardanto. 2014. Pengaruh Corporate Governance terhadap tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok*. 1-23.
- Utami, W. D, D. Suhardjanto, dan S. Hartoko. 2012. Investigasi Dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 20-23 September. 1-22.
- Widjayanti, S. A, dan Wahidawati. 2015. Pengaruh Struktur dan Mekanisme Corporate Governance pada Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 1-21.
- Wulan, Sari. 2013. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Disclosure. Skripsi Sarjana tak diterbitkan. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

LAMPIRAN

1. Uji Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KM	86	,00	89,79	8,6195	15,95903
KI	86	1,93	93,06	47,5181	25,51612
PRKI	86	25,00	66,67	38,5391	8,69288
JRDK	86	1,00	32,00	6,9186	6,56231
JADK	86	2,00	8,00	3,9884	1,50680
JAKA	86	2,00	5,00	3,1163	,54056
MANDSCR	86	60,27	76,71	67,8528	3,87892
Valid N (listwise)	86				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,67739939
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,067
Kolmogorov-Smirnov Z		,726
Asymp. Sig. (2-tailed)		,667

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

3. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,318 ^a	,101	,033	3,81449	2,154

a. Predictors: (Constant), JAKA, JRDK, KM, KI, JADK, PRKI

b. Dependent Variable: MANDSCR

4. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	64,049	2,991		21,416	,000		
	KM	,000	,029	,001	,011	,991	,810	1,234
	KI	-,013	,019	-,088	-,717	,475	,750	1,333
	PRKI	,114	,056	,256	2,046	,044	,729	1,372
	JRDK	-,149	,067	-,252	-2,217	,029	,883	1,132
	JADK	-,138	,304	-,054	-,453	,652	,814	1,228
	JAKA	,521	,819	,073	,636	,527	,874	1,144

a. Dependent Variable: MANDSCR

5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,420	1,571		,904	,369
	KM	,001	,015	,006	,047	,963
	KI	,019	,010	,241	1,941	,056
	PRKI	,010	,029	,042	,332	,741
	JRDK	,004	,035	,012	,107	,915
	JADK	-,110	,160	-,082	-,688	,494
	JAKA	,244	,430	,065	,567	,572

a. Dependent Variable: ABS_RES

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,318 ^a	,101	,033	3,81449

a. Predictors: (Constant), JAKA, JRDK, KM, KI, JADK, PRKI

b. Dependent Variable: MANDSCR

7. Uji Nilai F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	129,433	6	21,572	1,483	,195 ^a
	Residual	1149,478	79	14,550		
	Total	1278,911	85			

a. Predictors: (Constant), JAKA, JRDK, KM, KI, JADK, PRKI

b. Dependent Variable: MANDSCR

8. Uji Nilai T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64,049	2,991		21,416	,000
	KM	,000	,029	,001	,011	,991
	KI	-,013	,019	-,088	-,717	,475
	PRKI	,114	,056	,256	2,046	,044
	JRDK	-,149	,067	-,252	-2,217	,029
	JADK	-,138	,304	-,054	-,453	,652
	JAKA	,521	,819	,073	,636	,527

a. Dependent Variable: MANDSCR